

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

*Federation Internationale de Football Association* (FIFA) atau organisasi untuk sepak bola dunia pada tanggal 2 Desember 2010, di Zurich, Swiss menunjuk Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Setelah diresmikan sebagai tuan rumah, banyak keraguan atas kompetensi Qatar untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Mulai dari dugaan suap kepada FIFA untuk menjadi tuan rumah, cuaca panas yang ekstrem, sejarah buruk perihal migran, hingga kondisi politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah yang dianggap tidak stabil. Akan tetapi, Qatar percaya diri bisa menghadirkan Piala Dunia yang membawa keharmonisan bagi negara Jazirah Arab dan dunia Islam serta menjanjikan Piala Dunia yang modern dan termegah sepanjang sejarah kompetisi itu bergulir.<sup>1</sup> Untuk menjawab kritik sekaligus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh FIFA sebagai tuan rumah, pemerintah Qatar mengeluarkan dana 200-220 miliar USD yang dialokasikan pada pembangunan stadion, pelabuhan, rumah sakit, jalan, bandara, dan fasilitas penunjang lainnya.<sup>2</sup> Pemerintah Qatar juga mempekerjakan 500.000 hingga 1,5 juta pekerja migran yang didominasi oleh pekerja migran asal Asia Selatan dan Timur Tengah untuk mengisi posisi-posisi pekerjaan konstruksi hingga sektor rumah tangga.<sup>3</sup>

Piala Dunia 2022 yang diadakan di Qatar merupakan peristiwa olahraga di bidang sepakbola yang prestisius. Namun, sayangnya perhelatan akbar empat tahunan tersebut berhubungan dengan banyak bukti seputar penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan hak-

---

<sup>1</sup> Ghada Ahmed Abdel Aziz, 'The Saudi-US Alliance Challenges and Resilience, 2011: 2019', *Review of Economics and Political Science*, 2019.

<sup>2</sup> Sarika Rahman and others, 'Qatar 2022 FIFA World Cup : Exploitation of Workers', 2022, 1-5.

<sup>3</sup> Ibid.

hak pekerja, dan korupsi. Investigasi oleh otoritas Swiss dan AS atas tuduhan korupsi yang terkait FIFA yang telah menempatkan sorotan global pada masalah ini yang belum pernah terjadi sebelumnya. Permasalahan-permasalahan ini menodai penyelenggaraan Piala Dunia 2022 yang seharusnya mengedepankan semangat sportivitas.

Permasalahan yang menjadi sorotan utama ialah eksploitasi pekerja demi kelancaran persiapan Qatar dalam menyediakan infrastruktur kelas atas pada perhelatan Piala Dunia 2022. Upaya pencarian keuntungan tanpa henti, melalui transaksi barang dagangan dan dalam membangun stadion dan elemen infrastruktur lainnya untuk acara-acara penting, bersamaan dengan terdapatnya perlakuan yang buruk terhadap pekerja.<sup>4</sup> Tuntutan untuk dapat bekerja keras dan cepat menjadi alasan banyak pekerja migran didatangkan, kemudian dipekerjakan secara berlebihan.

Perolehan hak dan kebebasan mendasar untuk pekerja di Qatar baik untuk pekerja migran miskin dengan ekspatriat profesional mengalami permasalahan bahwasanya tidak ada perlindungan yang cukup bagi pekerja kelas bawah dan polarisasi upah yang cukup lebar jaraknya. Pekerja migran atau asing dipekerjakan oleh majikan yang memegang kekuasaan pada sektor perekrutan tenaga kerja, memiliki kontrol penuh atas upah dan kondisi kerja, mempunyai wewenang untuk menyimpan kartu identitas para pekerja, dan kemampuan melakukan perubahan pekerjaan atau visa keluar untuk meninggalkan Qatar. Sistem ini dikenal dengan istilah sistem Kafalah.<sup>5</sup>

Sistem Kafalah dalam penerapannya, khususnya pada persiapan Piala Dunia 2022, menuai panen kritik dari dunia internasional. *Human Right Watch* (HRW) menggambarkan bahwa Kafalah sebagai upaya Qatar memperlihatkan citra positif sebagai negara yang sukses

---

<sup>4</sup> Sharan Burrow, 'Sporting Mega-Events, Corruption and Rights: The Case of the 2022 Qatar World Cup', *Global Corruption Report: Sport*, September 1996, 2016, 198–203 <<https://doi.org/10.4324/9781315695709>>.

<sup>5</sup> ITUC, 'The Case Against Qatar: Host of the FIFA 2022 World Cup', *ITUC Special Report*, March, 2014.

namun pembangunan tertutupi oleh sistem perburuhan yang eksploitatif.<sup>6</sup> Sementara *International Trade Union Confederation* (ITUC) secara gamblang menyebut sistem ini merupakan praktik perbudakan modern. Sistem Kafalah menjadikan pekerja migran sangat bergantung kepada majikan (sponsor). Kontrol penuh yang dilakukan oleh majikan inilah membuat pekerja migran rentan terhadap eksploitasi dan kerja paksa.

Fakta yang terjadi memperlihatkan situasi pekerja migran miskin dipaksa bekerja berjam-jam di bawah iklim yang terik dan gerah dengan jangka waktu enam hari seminggu. Situasi ini meninggalkan kesan bahwasanya pemerintah Qatar tidak bertanggung jawab atas nasib dan kesejahteraan pekerja migran. Kemegahan persiapan Piala Dunia 2022 dengan Infrastruktur senilai USD 140 miliar diperkirakan akan membuat Qatar siap menjadi tuan rumah dengan pencapaian yang prestise.<sup>7</sup> Pembangunan infrastruktur tersebut melibatkan 500.000 pekerja menjelang persiapan optimal Piala Dunia.

Pada tahun 2013, isu eksploitasi terhadap pekerja migran muncul ketika salah satu *International Non-Governmental Organization* (INGO) yang bergerak di sektor perburuhan, *International Trade Union Confederation* (ITUC), organisasi yang telah fokus terhadap isu kematian di Qatar sejak dua tahun terakhir atau satu tahun setelah Qatar ditetapkan menjadi tuan rumah Piala Dunia, melalui temuannya menjelaskan bahwa pada tahun 2010-2013 pembangunan telah memakan korban di sektor konstruksi sebanyak 1.200 jiwa.<sup>8</sup> Dua tahun setelahnya, pada 2015, laporan ITUC yang dipublikasikan pada Hari Migran Internasional memperkirakan perusahaan-perusahaan yang bekerja di Qatar untuk sektor infrastruktur

---

<sup>6</sup> Pratik Nyaupane, 'Exploitation of Labor in Qatar: How Nepali Laborers Are Victimized in Preparation for the 2022 FIFA Men's World Cup', *Arizona State University' Thesis*, 33.1 (2020), 1–12 <[http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/whri/research/mushroomresearch/mushroomquality/fungienviroment%0Ahttps://us.vwr.com/assetsvc/asset/en\\_US/id/16490607/contents%0Ahttp://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf](http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/whri/research/mushroomresearch/mushroomquality/fungienviroment%0Ahttps://us.vwr.com/assetsvc/asset/en_US/id/16490607/contents%0Ahttp://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf)>.

<sup>7</sup> Op. Cit. ITUC.

<sup>8</sup> Alif Putra Mustiko, 'Upaya International Labour Organization (ILO) Dalam Melindungi Pekerja Migran Di Qatar Pada Persiapan Piala Dunia 2022', *Universitas Sriwijaya*, 2022.

mendapatkan keuntungan 15 miliar USD. Hal ini menuai kecaman karena keuntungan yang didapat merupakan hasil dari eksploitasi terhadap pekerja migran.<sup>9</sup>

Para pekerja migran menerima ketidakadilan perihal kondisi kerja yang mereka alami. *Amnesty International*, salah satu organisasi pemerhati hak asasi manusia, dalam laporannya yang berjudul "*The Darkside of Migration*" menjelaskan bahwa pekerja migran diperlakukan seperti binatang.<sup>10</sup> Para pekerja bisa bekerja selama 12 jam sehari bahkan di musim panas yang ekstrem, upah yang ditahan, tempat tinggal yang tidak memadai, hingga mendapatkan kondisi tempat kerja yang berbahaya. Laporan ini juga mempertanyakan standar keselamatan yang rentan di lokasi konstruksi di mana terdapat rumah sakit utama di Doha, yang pada 2012 lalu, menerima lebih dari 1.000 orang yang dirawat akibat jatuh dari ketinggian.<sup>11</sup>

Situasi dan kondisi buruh migran di Qatar terkait dengan persiapan Piala Dunia 2022 ini menjadi ironi. FIFA berharap adanya penegakan norma perilaku internasional dari semua tuan rumah, serta momentum Piala Dunia seharusnya dapat memicu perubahan sosial yang positif di Qatar, termasuk meningkatkan hak-hak tenaga kerja dan kondisi pekerja migran. Pada 21 November 2013, FIFA meminta "para pemimpin ekonomi dan politik untuk bergabung dengan komunitas sepak bola dalam memberikan kontribusi untuk memastikan bahwa standar kerja inti Organisasi Buruh Internasional diperkenalkan dengan cepat, konsisten, dan berkelanjutan di Qatar."<sup>12</sup>

FIFA sebenarnya pada bulan September 1996 menyetujui *Labour Practice Code* atau Kode Praktik Perburuhan yang mengatur perihal dalam kontrak komersial, penghormatan hak-hak buruh inti berdasarkan konvensi *International Labour Organization (ILO)* tentang

---

<sup>9</sup> Amnesty International, 'Promising Little, Delivering Less - Qatar and Migrant Labour Abuse Ahead of the 2022 Football World Cup', 2015, 11.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> ILO, *ILO Global Estimates on International Migrant Workers Results and Methodology*, International Labour Office, 2021.

kebebasan berserikat, perundingan bersama, non-diskriminasi. dan perlindungan dari pekerja anak dan kerja paksa. Landasan kesepakatan mengacu pada transparansi kontrak kerja terkait upah dan perlakuan buruk terhadap para pekerja terkait persiapan Piala Dunia.<sup>13</sup>

Eksplotasi yang menyelimuti pekerja migran di Qatar menjadi perhatian komunitas internasional. Salah satu organisasi internasional yang dianggap bertanggung jawab untuk melindungi pekerja migran di Qatar adalah ILO. ILO merupakan badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus untuk mewujudkan dan mendorong terciptanya kesempatan kerja yang luas bagi laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, adil, aman, dan bermartabat. Organisasi yang berdiri sejak 1919 ini memiliki 187 anggota di mana salah satu anggotanya adalah Qatar. Qatar sendiri secara resmi menjadi anggota ILO sejak tahun 1972 dan telah ikut meratifikasi 6 konvensi di ILO.<sup>14</sup>

Respon dari pemerintah Qatar tersebut berbeda dengan kondisi yang diterima pekerja migran. Hak dan kebebasan pekerja dilanggar akibat dari sistem perburuhan yang diskriminatif. Keluhan terus berdatangan mulai dari organisasi internasional, negara hingga kelompok pekerja. Oleh karena itu, Badan Pimpinan ILO dengan rekomendasinya pada tahun 2014, memutuskan untuk mengundang delegasi pemerintah, delegasi pengusaha dan delegasi pekerja untuk mendapatkan informasi yang relevan serta menempatkan masalah yang menimpa pekerja di Qatar pada sidang badan pimpinan ILO ke-323.

Proses panjang telah dilalui sejak isu eksploitasi terhadap pekerja muncul hingga menghasilkan perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, penulis ingin melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh ILO dalam memainkan peranannya sebagai organisasi internasional untuk melindungi pekerja migran melalui reformasi perburuhan Qatar. Hal ini merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti, selain ILO sebagai organisasi internasional yang

---

<sup>13</sup> Suwanto, *Undang-Undang Ketenagakerjaan ILO / USA Declaration Project* (Jakarta: Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Indonesia, 2003).

<sup>14</sup> Ibid.

memang punya kewajiban melindungi para pekerja/buruh di dunia, melihat upaya ILO juga menunjukkan bahwa semakin cairnya hubungan internasional di mana aktor non-negara mengambil peran penting dalam mempengaruhi kebijakan suatu negara untuk mencapai dan mewujudkan tujuan organisasinya. ILO sebagai organisasi internasional di bidang ketenagakerjaan dan perburuhan dapat menjalankan fungsinya untuk melakukan upaya intervensi untuk dapat memberikan kesejahteraan pada para buruh yang bekerja di Qatar.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penguraian latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana efektivitas peran ILO dalam melindungi hak para pekerja migran yang bekerja pada persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui efektivitas peran ILO dalam memberikan perlindungan hak para pekerja migran yang pada persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar.
- b. Untuk mengetahui Efektivitas peran ILO dalam memperjuangkan perolehan hak pekerja migran terkait dengan sejumlah permasalahan pada persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar.
- c. Untuk menjelaskan perlindungan pekerja migran yang bekerja dalam rangka persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

- a. Secara ilmiah penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup ilmu hubungan internasional bahwa organisasi internasional bertindak untuk melakukan perlindungan hak kemanusiaan pada suatu

negara. Pada studi kasus penelitian ini melibatkan ILO dengan para pekerja migran yang bekerja di Qatar.

- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan pustaka terkait efektivitas peran ILO dalam memberikan perlindungan terhadap hak pekerja migran terkait dengan sejumlah permasalahan pada persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar.

## **1.5. Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1. Landasan Teori**

#### **1.5.1.1. Peran Organisasi Internasional**

Pengertian dari peran adalah sebuah pola perilaku yang diharapkan sesuai dengan hak dan tanggung jawab dari aktor tersebut, ketika aktor mampu melakukan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan status dan kedudukan maka aktor tersebut telah menjalankan peranan.<sup>15</sup> Sedangkan pengertian terkait organisasi internasional adalah sebuah lembaga dengan beranggotakan minimal tiga negara, memiliki kegiatan di beberapa negara serta keanggotaannya tersebut diikat berdasarkan kesepakatan yang bersifat formal.

*Intergovernmental organization* (IGO) adalah institusi yang setiap anggotanya adalah merupakan delegasi resmi pemerintah negara-negara serta biasanya bermarkas di kota-kota besar. IGO memiliki anggota atau staf profesional yang bekerja *full-time* yang dianggap sebagai pegawai sipil internasional dan diharapkan mengembangkan kesetiaan yang bersifat supranasional atau organisasi.

Tujuan jangka panjang IGO sendiri biasanya ditentukan oleh badan-badan yang disebut majelis umum yang terdiri anggota negara yang terwakili. Mereka mengadakan rapat

---

<sup>15</sup> Thomas Risse, 'International Organizations and Institution', in *Handbook of International Relations* (Sage Pub, 2001).

paripurna atau pleno sesuai jadwal yang sudah ditetapkan untuk menentukan batas-batas dari kebijaksanaan umum serta tindakan yang harus diambil. IGO dipimpin oleh dewan eksekutif yang terdiri dari sejumlah kecil delegasi pemerintah yang bersifat permanen maupun berganti. Dewan ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam lembaga eksekutif, sekretariat dan melaksanakan fungsi-fungsi administrasi. Thomas Risse mengidentifikasi IGO bisa diklasifikasikan dalam 4 kategori berdasarkan keanggotaan serta tujuannya:<sup>16</sup>

- a. *Global membership and general-purposes organizations*. Merupakan organisasi seperti PBB, LBB yang mempunyai cakupan yang luas dan berbagai fungsi seperti pertahanan dan keamanan, kerja sama sosial dan ekonomi, perlindungan hak-hak asasi manusia dan sebagainya.
- b. *Global membership and limited-purposes organizations*. Merupakan organisasi-organisasi yang memiliki fungsi seperti badan-badan khusus PBB, *International Bank of Reconstruction Development (IBRD)*, *World Health Organization (WHO)*, dan UNESCO.
- c. *Regional Membership and General Purposes Organizations*. Merupakan organisasi-organisasi yang bersifat regional yang mempunyai luas lingkup sasarannya atau kegiatan di antaranya dalam bidang-bidang seperti keamanan, politik, ekonomi sosial.
- d. *Regional Membership and limited Purpose Organization*. Merupakan organisasi-organisasi yang memiliki sub divisi dalam bidang ekonomi-sosial dan militer atau organisasi-organisasi pertahanan misalnya NATO dan LAFTA. Ruang lingkup dari organisasi pemerintah terbagi dalam regional maupun global serta mencakup masalah-masalah sosial, ekonomi serta perang dan damai. Pertumbuhannya sendiri tidak terbatas terkhususnya pada tingkat regional.

---

<sup>16</sup> Ibid.



Teori organisasi internasional dari Archer berfungsi untuk mengatasi masalah global secara efektif tanpa adanya perang serta memfasilitasi kepentingan dari negara-negara anggotanya dalam melakukan komunikasi serta kerja sama dengan sesama anggota negara lain dalam mencapai tujuan bersama. ada 3 fungsi dari IGO yaitu:

1. Negara menggunakan IGO sebagai instrumen untuk berdiplomasi dengan negara yang lain karena pada dasarnya negara-negara membentuk IGO berkaitan dengan kepentingan negara mereka yang bersangkutan dengan kepentingan negara lain.
2. Sebagai tempat forum untuk berkomunikasi untuk bekerja sama, persetujuan bahkan pertentangan dimana arena tersebut bersifat netral. Arena ini menjadi tempat untuk mengedepankan kepentingan, menunjukkan sudut pandang terhadap sesuatu di depan forum.
3. IGO berperan sebagai aktor yang tidak terpengaruh dari luar ketika membuat sebuah kebijakan. Dengan memiliki kapasitas sebagai aktor yang ditentukan oleh rekomendasi, resolusi dan mandat pada saat dibentuknya organisasi tersebut.

Pemahaman terkait peran dan organisasi internasional yang menjadi fokus dalam penelitian ini untuk menganalisis peran organisasi internasional ILO dalam permasalahan pekerja menggunakan konsep peran organisasi internasional oleh Clive Archer dimana konsep yang dikemukakan berisikan tiga peran utama dari organisasi internasional yakni sebagai instrumen, arena dan aktor,<sup>17</sup> sedangkan konsep peran organisasi internasional lainnya cenderung lebih bersifat teknis seperti milik Leroy Bennet yang menyatakan bahwa organisasi internasional dalam menangani suatu permasalahan akan melaksanakan beberapa peran yakni memberikan kerja sama secara teknis, penelitian dan informasi serta pendidikan dan pelatihan sehingga kurang mampu menjelaskan peran organisasi internasional secara lebih luas.<sup>18</sup> Selain

---

<sup>17</sup> Clive Archer, 'International Organisations', *International Organisations*, 2002

<sup>18</sup> Philippe Ragnier, 'The Emerging Concept of Humanitarian Diplomacy: Identification of a Community of Practice and Prospects for International Recognition', *International Review of the Red Cross*, 93.884 (2011), 1211–37 <<https://doi.org/10.1017/S1816383112000574>>.

itu, konsep peran yang dimiliki oleh Biddle mengemukakan dua peran yakni sebagai motivator dimana organisasi internasional memberikan dorongan terhadap aktor lain agar aktor tersebut melakukan aksi tertentu yang mampu merealisasikan tujuan daripada organisasi tersebut; serta sebagai komunikator yaitu dimana organisasi internasional memiliki kewajiban untuk menyampaikan segala sesuatu bentuk informasi yang mana dapat dipertanggungjawabkan oleh organisasi tersebut.

Konsep ini terkandung dalam buku Clive Archer yang berjudul “*International Organization*”. Dalam bukunya, Clive Archer menjelaskan bagaimana setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi internasional dapat dijadikan panduan untuk dapat mengklasifikasikan organisasi internasional tersebut. Selain itu, Clive Archer pun memberikan penjelasan bahwasanya organisasi internasional memiliki peran yang dimainkan di dalam sistem dan fungsi yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut.<sup>19</sup> Menurut Clive Archer, tiap-tiap organisasi internasional memiliki peran dan fungsi yang berbeda yakni dimana beberapa organisasi internasional memiliki peran dan fungsi yang terbatas, disisi lain terdapat beberapa organisasi internasional yang memiliki peran dan fungsi yang lebih luas.

Dalam bukunya, Clive Archer menjelaskan bahwa organisasi internasional memiliki tiga peran utama yang mana menjadi variabel dalam struktur internasional pada suatu kasus ataupun fenomena yang akan diteliti oleh penulis, ketiga peran tersebut yakni:<sup>20</sup>

- a. Instrumen. Clive Archer menjelaskan bahwa organisasi internasional adalah suatu alat ataupun sarana yang dapat digunakan oleh anggota-anggotanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menyelaraskan tindakan dari para anggota yang akan dilakukan demi mencapai tujuan tersebut.

---

<sup>19</sup> Op. Cit. Clive Archer.

<sup>20</sup> Ibid.

- b. Arena. Clive Archer menjelaskan bahwa arena yang dimaksud tersebut dalam organisasi internasional adalah adanya peran dari organisasi internasional untuk mampu mengadakan forum dengan dihadiri oleh negara anggota ataupun aktor lainnya terkait dengan suatu isu yang akan dihadapi yang mana hasil dari diadakannya forum tersebut adalah konvensi, perjanjian ataupun persetujuan. Organisasi internasional mengadakan forum yang netral dimana dalam forum tersebut dapat digunakan sebagai lahan berargumen satu sama lain, saling bekerja sama ataupun sebagai lahan permainan bagi para anggota dalam forum tersebut. Selain itu forum bersifat inklusif dimana keanggotaan forum dan kebijakan dalam forum dapat diketahui dan dilaksanakan secara terbuka. Serta organisasi internasional mampu menjembatani komunikasi antara negara anggota maupun aktor dalam suatu forum. Dalam berperan sering kali organisasi internasional memainkan dua peran sekaligus yakni memberikan sarana atas kerja sama di antara negara anggota-anggota dan aktor *non-state* sembari memainkan perannya sebagai instrumen bagi negara anggota-anggotanya yang mana sesuai dengan peran pertama sebelumnya.
- c. Aktor. Clive Archer menjelaskan bahwa aktor yang mana di sini berarti organisasi internasional mampu bersifat independen atau mandiri, dimana organisasi internasional mampu bertindak tanpa adanya intervensi ataupun arahan dari pihak mana pun. Beberapa organisasi internasional lebih cenderung bersifat dependen terhadap anggota-anggotanya, dengan kata lain organisasi tersebut adalah hanya sebuah bentuk cerminan dari tujuan kolektif dari para anggotanya dimana organisasi sebagai alat/instrumen untuk merealisasikan tujuannya di tingkat internasional. Akan tetapi, organisasi internasional pun mampu bergerak secara menjadi perintis bagi pembuat kebijakan yang mana akan diterapkan dalam suatu

negara, hal tersebut akan mendorong suatu negara agar bertindak sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut. Dengan kata lain, sebagai aktor organisasi internasional mampu memberikan tindakan secara mandiri kepada negara anggota ataupun aktor lainnya. Dalam hal ini menurut Clive Archer, identitas organisasi internasional sebagai aktor yang independen akan menghasilkan suatu tindakan yang mana diambil secara mandiri dan akan menunjukkan bahwa organisasi internasional adalah aktor dalam dunia politik.<sup>21</sup>

Ketiga peran organisasi internasional menurut Clive Archer tersebut, peran-peran yang telah dijelaskan dapat saling berkaitan satu sama lain akan tetapi sering kali menimbulkan kontradiksi. Sebagaimana suatu organisasi internasional dapat berperan sebagai arena dan aktor dalam mencapai tujuannya dengan baik sedangkan dalam memainkan perannya sebagai instrumen, organisasi internasional tersebut cenderung bergantung pada agenda daripada aktor lain.

Penilaian efektivitas ILO mengacu pada sejumlah indikator dalam menilai dampak serta upaya organisasi tersebut. Indikator peran IGO terkait dengan upaya penyelesaian permasalahan di suatu wilayah dan/atau negara, berdasarkan Andrea Warnecke menjelaskan bahwasanya peran IGO terindikasi perannya sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Ruang lingkup tindakan IGO memiliki posisi *vis-à-vis* dengan pemerintah negara tuan rumah dalam hal-hal penting lebih mirip dengan IGO besar daripada dengan organ-organ politik Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bilateral donor. Hal ini, pada gilirannya, sangat membatasi kemampuan mereka untuk terlibat dengan dan menghadapi pihak-pihak yang berkonflik di dalam negara-negara berdaulat.

---

<sup>21</sup> Samuel Barkin, *International Organization: Theory and Institutions*, (Hampshire: Macmillan, 2006).

<sup>22</sup> Andrea Warnecke, 'Can Intergovernmental Organizations Be Peacebuilders in Intra-State War?', *Journal of Intervention and Statebuilding*, 2020, 634–53

- b. Kedua, dan terkait, dalam memfokuskan pada antarmuka hukum, kelembagaan, dan politik antara IGO dan pemerintah negara target. Warnecke berpendapat bahwa ketergantungan IGO pada sumber legitimasi dan otoritas alternatif (yaitu non-negara) seperti pengetahuan ahli dan moral kredibilitas secara paradoks semakin membatasi ruang lingkup mereka untuk bertindak sebagai pemecah masalah secara *vis-à-vis* dengan pemerintah negara tuan rumah.

IGO diciptakan oleh negara-negara berdaulat untuk menyimpulkan dan mengimplementasikan sebuah perjanjian internasional. Seiring waktu, birokrasi dari beberapa organisasi ini telah memperluas kapasitas kelembagaan dan ruang lingkup tindakan mereka, sehingga memperoleh independensi yang lebih besar dari agenda asli mereka yang digerakkan oleh negara. Efektivitas peran IGO dalam masalah ini. Berdasarkan tesis Dennis Karlsson tentang keterkaitan peran IGO dan efek dampaknya, maka didapatkan bahwa IGO dapat berperan efektif menyelesaikan masalah perburuhan internasional, dengan sejumlah penarikan indikasi sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Peran IGO dalam penyelesaian konflik terkait dengan mendorong pembentukan kebijakan yang dibuat kuat dan bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dalam tujuan pencapaian kepentingan nasional melalui ketetapan hukum. Sehingga, IGO dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan negara dalam pembuatan perundangan terhadap perburuhan.
2. IGO dapat melakukan negosiasi secara langsung terhadap eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Negosiasi yang dilakukan IGO yang mempunyai kemampuan untuk membangun perdamaian lewat analisa, mencegah, menyelesaikan bahkan mengakomodasi konflik internasional melalui upaya komunikasi, pemahaman

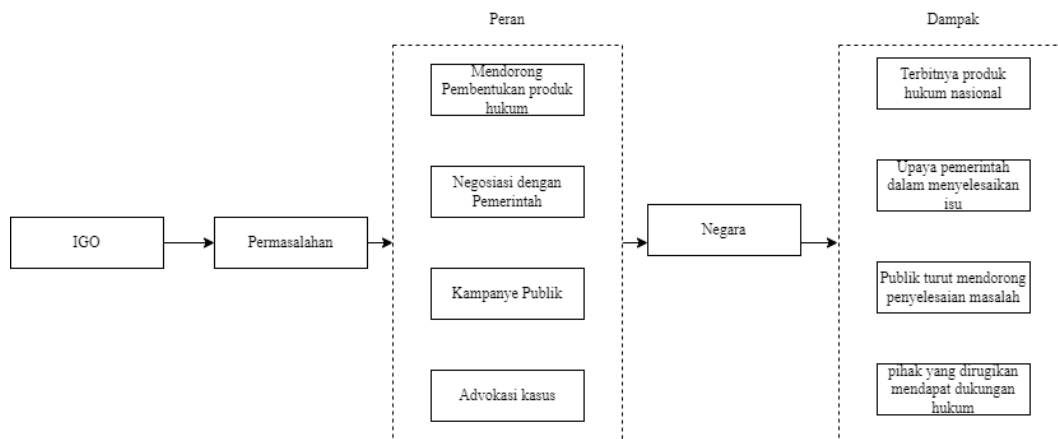
---

<sup>23</sup> Dennis Fonseca Karlsson, 'The Connection Between Effective Democratic Aid and IGO', *Gothenburg Political* (Gothenburg, 2020).

dan membangun hubungan yang baik dalam menyelesaikan permasalahan yang terkadang tidak terjangkau oleh pemerintah dengan keadaan yang tidak kaku dengan aktor-aktor penggerak yang berlatar belakang sebagai akademisi, peneliti, pegiat sosial atau memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Sehingga, IGO berperan memberikan masukan dalam proses negosiasi yang dapat menjadi jalan keluar kedua belah pihak yang berkonflik.

3. IGO dapat melakukan kampanye secara luas di publik mengenai perburuhan. Kampanye yang dapat dilakukan oleh IGO terkait dengan begitu erat kerja sama hubungannya dengan institusi pendidikan baik sekolah maupun universitas, pusat penelitian, analisis serta program studi menyebarkan ide tentang perdamaian, mediasi bahkan pada resolusi konflik. Sehingga, IGO dapat melakukan sosialisasi terkait permasalahan dengan baik.
4. IGO dapat mengadvokasi kasus-kasus sengketa perburuhan. perwujudan perdamaian melalui advokasi dengan berfokus pada aktivisme perdamaian dan environmental terhadap kepentingan khusus mengenai kebijakan dari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk protes, pendidikan, aturan, dukungan, pengawasan, pendidikan dan advokasi. Cara ini sangat baik untuk mengawasi serta memberi *feedback* terhadap hasil kerja pemerintah serta perlawanan atas ketidakadilan dan pelanggaran HAM, namun kekurangannya adalah perbedaan yang timbul dari cara pandang individu terhadap suatu masalah yang tidak bisa ditolerir sehingga berujung konflik.

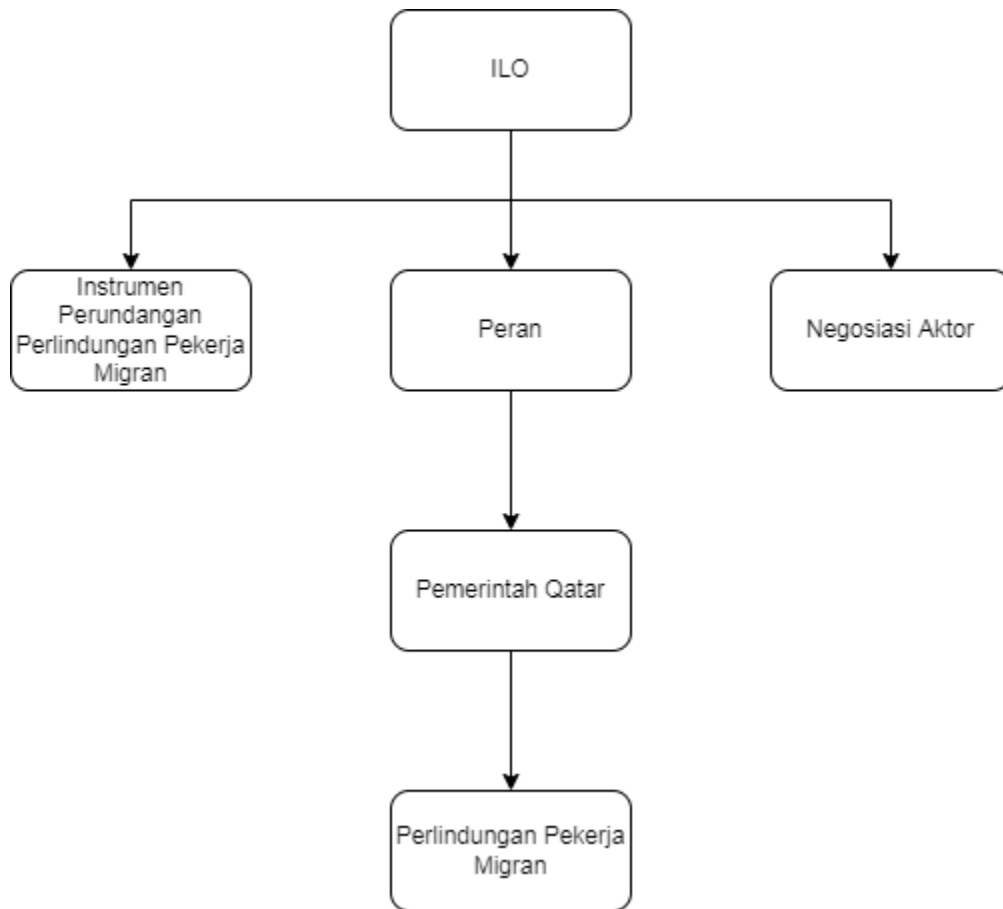
Sehingga dengan demikian, pengukuran terhadap indikator efektivitas IGO dapat diukur dari empat indikator tersebut. Secara garis besar, pengukuran efektivitas peran IGO dapat dilihat pada tabel berikut:



**Gambar 1. 1 Indikator Efektivitas Peran IGO**

Semakin banyak indikator dipenuhi, maka IGO tersebut dikatakan efektif dalam mengatasi masalah perburuhan terutama terkait dengan persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar. ILO sebagai IGO dapat berperan mendorong terciptanya pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat terhadap para pekerja asing yang mengalami ketidakadilan.

### 1.5.2. Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 2 Sintesa Pemikiran

Peran *International Labour Organization* (ILO) dalam memperjuangkan hak pekerja migran di Qatar terkait perhelatan Piala Dunia 2022 perlu sejumlah instrumen perundangan yang kuat, peran yang signifikan, serta proses negosiasi antar aktor organisasi dengan pemerintah Qatar. Sehingga, kebijakan nasional terkait dengan perlindungan pekerja migran dapat efektif diterapkan sesuai dengan keberadaan hak pekerja secara global. Penjelasan terkait dengan keberadaan indikator peran IGO dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran IGO dalam penyelesaian konflik terkait dengan mendorong pemerintah untuk membentuk kebijakan melalui ketetapan hukum terkait perolehan hak pekerja.



- b. IGO dapat melakukan negosiasi secara langsung terhadap pemerintah Qatar untuk dapat menyelesaikan permasalahan perburuhan terkait dengan persiapan Piala Dunia 2022. Sehingga, IGO berperan memberikan masukan dalam proses negosiasi yang dapat menjadi jalan keluar kedua belah pihak yang berkonflik, pengusaha dengan buruh kerja.
- c. IGO berperan aktif dalam melakukan kampanye secara luas di publik mengenai perburuhan hingga tindakan upaya mengadvokasi kasus perburuhan terkait persiapan Piala Dunia 2022.

### **1.6. Argumen Utama**

Pengukuran atas efektivitas peran ILO terkait dengan perlindungan dan perolehan hak pekerja migran dalam persiapan Piala Dunia 2022 Qatar mengacu pada sejumlah indikator peran, antara lain: pertama, peran IGO dalam mendorong kebijakan negara untuk perancangan dan pembuatan perundangan terhadap perburuhan, sehingga terdapatnya jaminan hukum atas perolehan hak pekerja migran; kedua, berperan untuk menginisiasi upaya negosiasi secara langsung terhadap eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dilakukan IGO terhadap pemerintah Qatar; ketiga, IGO berperan mengadakan kampanye publik mengenai perburuhan; terakhir, pengupayaan advokasi yang dilakukan IGO untuk mengawasi serta memberi *feedback* terhadap hasil kerja pemerintah serta perlawanan atas ketidakadilan dan pelanggaran HAM, namun kekurangannya adalah perbedaan yang timbul dari cara pandang individu terhadap suatu masalah yang tidak bisa ditolerir sehingga berujung konflik. Berdasarkan indikator di atas IGO seharusnya dapat berperan efektif dalam memediasi permasalahan perburuhan, terutama perlindungan hak pekerja imigran serta perolehan kesejahteraan pekerja, yang menjadi problem terkait persiapan Piala Dunia 2022 Qatar.

## **1.7. Metodologi Penelitian**

### **1.7.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam tulisan skripsi ini bersifat eksplanatif. Penulis memanfaatkan dan menggunakan kajian peran organisasi internasional terkait dengan penerapan kebijakan perundangan ketenagakerjaan terhadap pekerja migran di Qatar. Tipe penelitian eksplanatif sendiri dapat diartikan secara umum sebagai penelitian empiris dengan data yang tidak berbentuk angka.<sup>24</sup> Hal tersebut sesuai dengan penelitian ini dimana data yang diambil penulis merupakan data pustaka yang tidak berbentuk statistik ataupun angka. Penelitian kualitatif yang menjadi jenis penelitian ini mengacu kepada karakteristik, sekelompok orang, benda, atau peristiwa; yang melibatkan proses konseptualisasi, dan membentuk skema klasifikasi.<sup>25</sup>

### **1.7.2. Jangkauan Penelitian**

Ruang lingkup dan batasan penelitian ini bermula dari intervensi ILO ketika menyikapi penindasan terhadap pekerja migran di Qatar pada tahun 2013 hingga menjelang perhelatan Piala Dunia pada tahun 2022.

### **1.7.3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan. Segala sumber informasi yang didapat penulis diambil atau dikutip dari berbagai jenis buku baik buku berbentuk fisik maupun online. Penulis juga melakukan teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dengan mengambil buku ataupun referensi online di internet dari berbagai sumber

---

<sup>24</sup> Keith F. Punch. 1998. *Introduction to Social Research : Quantitative and Qualitative Approaches*. Sage, London. Hal 4.

<sup>25</sup> Ulber Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

terpercaya seperti sumber kepustakaan yang diambil dan dijadikan acuan penulisan penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber.

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah sumber seperti buku, literatur, catatan-catatan, serta laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>26</sup> Penulis menggunakan beberapa sumber data seperti buku, majalah, koran, dan literatur lainnya dalam upaya untuk mencari dan membentuk landasan teori penulis.<sup>27</sup>

#### **1.7.4. Teknik Analisis Data**

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dalam menganalisis data yang didapatkan penulis. Dikarenakan teori yang dipakai penulis dalam tulisan ini bersifat eksplanatif, tentunya teknik analisis kualitatif menjadi satu-satunya opsi yang baik guna mengolah segala sumber data yang didapatkan penulis dari sumber kepustakaan yang ada dengan bentuk data yang tidak berupa angka.<sup>28</sup>

#### **1.8. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini akan tersaji dengan sistematika seperti berikut :

Bab I berisi hal-hal mengenai penjelasan penelitian ini seperti latar belakang masalah yang diteliti, pemaparan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dilanjutkan dengan kerangka pemikiran yang diisi oleh kerangka berpikir serta landasan teori. Selanjutnya, diteruskan dengan sintesa pemikiran, argumen utama, dan juga metodologi penelitian.

Bab II berisi tentang penyajian data melalui studi kepustakaan tentang sejarah dan data keberadaan pekerja migran di Qatar terkait dengan persiapan Piala Dunia 2022. Adapun pada

---

<sup>26</sup> Mohammad Nazir. 1988. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia.

<sup>27</sup> Arikunto Suharsimi. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Bumi Aksara

<sup>28</sup> Ibid.

bab ini akan diperinci pada sub bab berikut: 2.1. Persiapan Qatar menyambut Piala Dunia 2022. Pada sub bab ini berisikan tentang upaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. 2.2. Permasalahan Perburuhan Qatar selama Persiapan Piala Dunia 2022. Pada sub bab ini berisikan tentang pemaparan data sejumlah permasalahan perburuhan yang akan menjadi tinjauan peran IGO sesuai indikator: peran dalam mendorong pemerintah Qatar menerbitkan kebijakan perburuhan yang adil, kampanye dan advokasi terkait kesejahteraan pekerja, serta proses negosiasi. 2.3. Respon ILO terhadap Permasalahan Perburuhan di Qatar.

BAB III berisi pembahasan menggunakan teori peran organisasi Internasional. Analisis pada bab ini akan mengacu pada respon dan upaya ILO dalam memenuhi hak pekerja migran di Qatar, terutama terkait sejumlah upaya sesuai indikator: peran dalam mendorong pemerintah Qatar menerbitkan kebijakan perburuhan yang adil, kampanye dan advokasi terkait kesejahteraan pekerja, serta proses negosiasi.

BAB IV berisi tentang kesimpulan yang akan disertai dengan kritik dan saran dari penulis.

